

**LOKA POM DI KOTA  
LUBUKLINGGAU**



**TAHUN ANGGARAN  
2023**



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU**

**LAPORAN  
KEUANGAN  
TA 2023  
UNAUDITED  
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1,  
TLP. (0733) 328 5590; 328 5450, EMAIL: [loka\\_lubuklinggau@pom.go.id](mailto:loka_lubuklinggau@pom.go.id),  
[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id).

## KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *unaudited* Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK No.57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga Laporan Keuangan yang kami susun untuk Tahun 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Lubuklinggau, 19 Januari 2024



Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau

Ronny Syafrri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>7</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>8</b>
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	8
2. Neraca .....	8
3. Laporan Operasional .....	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas .....	9
5. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	9
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>10</b>
<b>II. NERACA .....</b>	<b>11</b>
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>12</b>
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....</b>	<b>13</b>
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penjelasan Umum .....	14
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau .....	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	17
A.3. Basis Akuntansi.....	18
A.4. Dasar Pengukuran .....	18
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	30
B.1. Pendapatan .....	31
B.2. Belanja .....	31
B.3. Belanja Pegawai .....	33
B.4. Belanja Barang.....	35
B.5. Belanja Modal .....	36
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca .....	38
C.1. Aset Lancar .....	38
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka .....	38
C.1.2. Persediaan .....	39
C.2. Aset Tetap.....	40

C.2.1. Tanah .....	40
C.2.2. Peralatan dan Mesin .....	41
C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	43
C.3. Kewajiban Jangka Pendek.....	43
C.3.1. Utang Pihak Ketiga .....	43
C.4. Ekuitas .....	44
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	45
D.1. Pendapatan.....	45
D.2. Beban Pegawai.....	45
D.3. Bahan Persediaan .....	46
D.4. Beban Barang dan Jasa .....	46
D.5. Beban Pemeliharaan .....	48
D.6. Beban Perjalanan Dinas .....	48
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	49
D.8. Kegiatan Non Operasional.....	50
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	51
E.1. Ekuitas Awal.....	51
E.2. Surplus (Defisit) LO .....	51
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas .....	51
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi .....	51
E.4. Transaksi Antar Entitas .....	51
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) .....	52
E.4.2. Transfer Masuk .....	52
E.5. Ekuitas Akhir .....	53
F. Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya .....	54
F.1. Gedung Kantor dan Mobil Operasional.....	54
F.2. Pengelola Keuangan .....	54
F.3. Nomor rekening dan NPWP .....	55
F.4. Alat gelas kualitatif .....	55
F.5. Barang bukti .....	56
F.6. Program Prioritas Nasional .....	57
F.7. Pengungkapan Tematik APBN.....	60
F.8. Capaian Output Strategis lainnya.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang .....	22
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	27
Tabel 3 Rincian Laporan Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja TA 2023 .....	31
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022.....	31
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023.....	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022.....	32
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 .....	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022.....	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 .....	36
Tabel 10 Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2023 .....	37
Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022 .....	38
Tabel 12 Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022 .....	38
Tabel 13 Perbandingan Rincian Persediaan TA dan 2022 .....	39
Tabel 14 Tabel Stok Opname Persediaan Tahun 2023 .....	39
Tabel 15 Rincian Mutasi Tanah.....	40
Tabel 16 Rincian Tanah TA 2023.....	40
Tabel 17 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023 .....	41
Tabel 18 Rincian Mutasi Tambah TA 2023 .....	42
Tabel 19 Rincian Reklasifikasi Masuk TA 2023 .....	42
Tabel 20 Rincian Transfer Masuk TA 2023.....	42
Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang TA 2023.....	43
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 .....	43
Tabel 23 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023 .....	44
Tabel 24 Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022.....	45
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022 .....	46
Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 .....	47
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022.....	48
Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022.....	49
Tabel 29 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022.....	49
Tabel 30 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022.....	50
Tabel 31 Transaksi Antar Entitas TA 2023.....	51
Tabel 32 DDEL dan DKEL TA 2023.....	52
Tabel 33 Transfer Masuk TA 2023.....	52
Tabel 34 Rincian Nomor rekening dan Saldo TA 2023.....	55
Tabel 35 Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif.....	56
Tabel 36 Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti .....	57
Tabel 37 Capaian Output Periode 31 Desember 2023.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan.....	16
--	----



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No.149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

**BADAN POM** Tlp. (0733) 328 5590; 328 5450, Email : loka\_lubuklinggau@pom.go.id, Subsiti : lubuklinggau.pom.go.id

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *unaudited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 19 Januari 2024

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text 'LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN' is written at the top, 'BADAN POM' is in the center, and 'DI KOTA LUBUKLINGGAU' is at the bottom. A stylized logo is in the center. A black ink signature is written over the stamp.

Romy Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 *unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beserta perubahannya berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja TA 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 600.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.704.150.435,00 atau mencapai 99.18% dari alokasi anggaran sebesar Rp .734.843.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.885.651.127,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp70.445.541,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.815.205.586,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.438.447,00 dan Rp6.879.212.680,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00; sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.841.821.516,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.841.821.516,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional senilai Rp600.000,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp.0,00; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.841.221.516,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp873.968.182,00; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.841.221.516,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp6.029.021.000,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.817.445.014,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp6.879.212.680,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	Th 2023		% THD ANGGARAN	Th 2022
		ANGGARAN	REALISASI		RELISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
Penerimaan Negara bukan Pajak	B.1	0,00	600.000,00	0	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>		0,00	600.000,00	0	0,00
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1.825.417.000,00	1.809.412.041,00	99,12	1.763.538.272,00
Belanja Barang	B.4	1.787.427.000,00	1.773.151.360,00	99,20	1.630.485.669,00
Belanja Modal	B.5	121.999.000,00	121.587.034,00	99,66	654.503.247,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		3.734.843.000,00	3.704.150.435,00	99,18	4.048.527.188,00

Lubuklinggau, 19 Januari 2024

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## II. NERACA

### LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja dibayar di Muka	C.1.1	11.771.090,00	22.390.356,00
Persediaan	C.1.2	58.674.451,00	58.940.784,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>70.445.541,00</b>	<b>81.331.140,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2.1	6.065.021.000,00	36.000.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.757.553.628,00	1.518.268.014,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.3	-1.007.369.042,00	-756.010.251,00
<b>Peralatan dan Mesin (Netto)</b>		<b>6.815.205.586,00</b>	<b>798.257.763,00</b>
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6.815.205.586,00</b>	<b>798.257.763,00</b>
<b>Jumat Aset</b>		<b>6.885.651.127,00</b>	<b>879.588.903,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	6.438.447,00	5.620.721,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>6.438.447,00</b>	<b>5.620.721,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>6.438.447,00</b>	<b>5.620.721,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
<b>Jumlah Ekuitas</b>	C.4	6.879.212.680,00	873.968.182,00
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>6.879.212.680,00</b>	<b>873.968.182,00</b>
		<b>6.885.651.127,00</b>	<b>879.588.903,00</b>

Lubuklinggau, 19 Januari 2024



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>			
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	1.809.412.041,00	1.762.593.272,00
Beban Persediaan	D.3	65.478.603,00	56.996.499,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	919.248.873,00	986.909.376,00
Beban pemeliharaan	D.5	19.450.000,00	58.752.014,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	783.101.509,00	578.525.520,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	245.130.490,00	206.950.879,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>		<b>3.841.821.516,00</b>	<b>3.650.727.560,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.841.821.516,00)</b>	<b>(3.650.727.560,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		600.000,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.841.221.516,00)</b>	<b>(3.650.727.560,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(3.841.221.516,00)</b>	<b>(3.650.727.560,00)</b>

Lubuklinggau, 19 Januari 2024

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	873.968.182,00	393.653.554,00
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(3.841.221.516,00)	(3.650.727.560,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	6.029.021.000,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.1	6.029.021.000,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.817.445.014,00	4.131.042.188,00
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		6.005.244.498,00	480.314.628,00
EKUITAS AKHIR	E.5	<b>6.879.212.680,00</b>	<b>873.968.182,00</b>

Lubuklinggau, 19 Januari 2024



Kepala Loka POM  
Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

##### **Pasal 33**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

##### **Pasal 34**

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang

pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Loka POM di Kota Lubuklinggau didukung struktur organisasi setingkat eselon IV terdiri dari :

- ✚ Kepala;
- ✚ Kelompok Jabatan Fungsional;

## **BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri dalam pengelolaan anggaran dan telah memiliki kode Satker sendiri (672851) sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-66/AAG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penambahan Refensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang

pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024

***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Misi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 *unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Loka POM.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 *Unaudited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Pendapatan  
-LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-  
LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

#### *Belanja*

##### (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

##### (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

##### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1  
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
  1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
    - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pemandang, Hewan Percobaan;
    - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
    - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
  2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pemandang.
  3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan persediaan meliputi:
    - a. Harga pembelian
    - b. Biaya pengangkutan
    - c. Biaya penanganan
    - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
  - a. Potongan harga
  - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
  - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
  - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
    - 2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan.
    - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
  - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
    - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### b. Aset Tetap

- a) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
  - b) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - c) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - d) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - e) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau

masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  - i. Tanah
  - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
  - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat 4 Tahun.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### *Kewajiban*

#### (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

*Ekuitas*

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu senilai Rp3.847.267.000,00 menjadi Rp3.734.843.000,00.

Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terdapat 10 kali revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :

- a. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 27 Desember 2022 dalam rangka Automatic Adjustment (Pemblokiran Mandiri).
- b. Revisi II DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Februari 2023 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA.
- c. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 April 2023 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA .
- d. Revisi IV DIPA pada tanggal 21 Juni 2023 pemuakhiran wewenang KPA.
- e. Revisi V DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Juli 2023 pemuakhiran POK dan revisi halaman III DIPA.
- f. Revisi VI DIPA pada DJA tanggal 13 Juli 2023 refofusing anggaran atas automatic adjusment.
- g. Revisi VII DIPA pada DJA tanggal 15 September 2023 dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai.
- h. Revisi VIII DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan pemenuhan belanja oprasional (belanja pegawai) tanggal 27 Oktober 2023.
- i. Revisi IX DIPA pada tanggal 30 November 2023 pemuakhiran wewenang KPA.
- j. Revisi X DIPA pada tanggal 14 Desember 2023 pemuakhiran wewenang KPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Rincian Laporan Perubahan Anggaran  
Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai (51)	1.754.400.000,00	1.825.417.000,00
Belanja Barang (52)	1.970.868.000,00	1.787.427.000,00
Belanja Modal (53)	121.999.000,00	121.999.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.847.267.000,00</b>	<b>3.734.843.000,00</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp  
600.000,00

### B.1 Pendapatan

Pendapatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TA 2023 adalah sebesar Rp600.000,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 4  
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	600.000	0
Penerimaan Hibah	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp600.000 berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan kelebihan pembayaran perjadiin Tahun 2022 sesuai NTPN A5E003CIFATFE64S tanggal 17 Mei 2023.

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp  
3.704.150.435,00

### B.2 Belanja

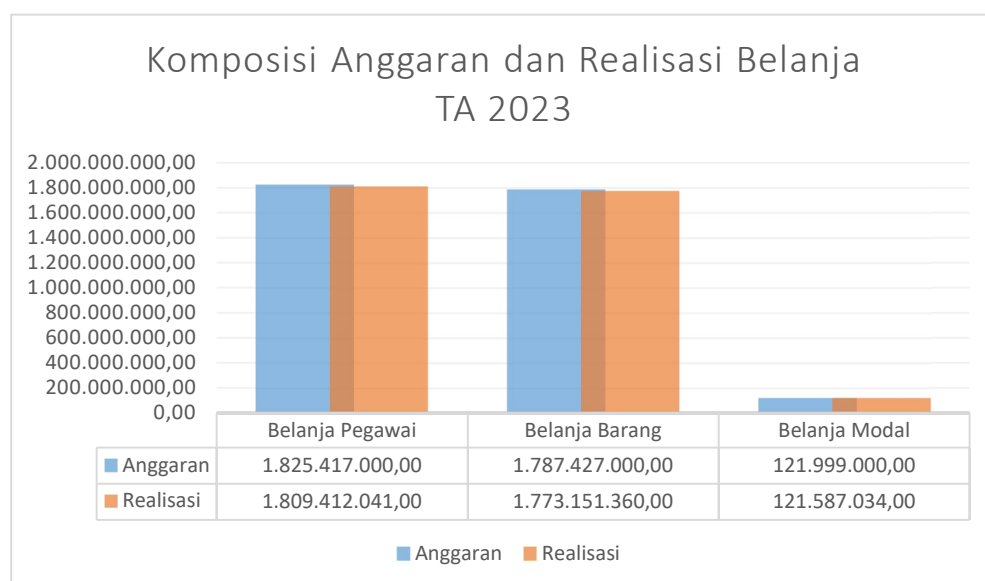
Realisasi Belanja Negara Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TA 2023 adalah sebesar Rp3.704.150.435,00 atau 99,18% dari anggaran belanja

sebesar Rp3.734.843.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Belanja Bruto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	1.825.417.000,00	1.809.597.045,00	99,13
Belanja Barang	1.787.427.000,00	1.775.391.980,00	99,33
Belanja Modal	121.999.000,00	121.587.034,00	99,66
Pengembalian Belanja Pegawai		(185000)	N/A
Pengembalian Belanja Barang		(2240620)	N/A
<b>Belanja Netto</b>	<b>3.734.843.000,00</b>	<b>3.704.150.439,00</b>	<b>99,18</b>

Realisasi belanja netto TA 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

JENIS BELANJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 1.809.412.041,00	Rp 1.763.538.272,00	3%
Belanja Barang	Rp 1.773.151.360,00	Rp 1.630.485.669,00	9%
Belanja Modal	Rp 121.587.034,00	Rp 654.503.247,00	(81%)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.704.150.435,00</b>	<b>Rp 4.048.527.188,00</b>	<b>(9%)</b>

Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 9 persen dari TA 2022. Penurunan realisasi belanja yang signifikan terjadi pada jenis belanja modal. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat

anggaran untuk pengadaan mobil laboratorium keliling (mobling).

Belanja Pegawai  
Rp  
1.809.412.041,00

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.809.412.041,00 dan Rp1.763.538.272,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya pengalihan jenjang jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu yang mengakibatkan kenaikan gaji dan tunjangan.
2. Adanya penambahan pegawai PPPK.

Tabel 7  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp867.910.360,00	Rp833.292.546,00	4%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp12.163.898,00		N/A
Belanja Lembur	Rp334.000,00	Rp1.247.000,00	(73%)
Belanja Tunjangan Khusus	Rp929.188.787,00	Rp928.998.726,00	0%
<b>Total Belanja kotor</b>	<b>Rp1.809.597.045,00</b>	<b>Rp1.763.538.272,00</b>	3%
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp185.004,00		N/A
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>Rp1.809.412.041,00</b>	<b>Rp1.763.538.272,00</b>	3%

Adapun rincian atas pengembalian belanja pegawai tersebut karena adanya pengangkatan jabatan fungsional tertentu yang sebelumnya pegawai tersebut telah dibayarkan gaji dengan komponen tunjangan fungsional umum melalui SPM kekurangan gaji Nomor 00116A tanggal 04 April 2023 dan SP2D Nomor 230701302000393 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp185.000,00. Dan pembayaran kekurangan THR melalui

SPM kekurangan THR Nomor 00121A tanggal 05 April 2023 dan SP2D Nomor 230701502000051 tanggal 06 April 2023 dengan nilai Rp4,00.

Belanja Barang  
Rp  
1.773.151.360,00

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.773.151.360,00 dan Rp1.630.485.669,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan 9 persen dari realisasi belanja barang pada 2022 terutama pada jenis belanja perjalanan dinas karena Loka POM di kota Lubuklinggau terdapat kenaikan target (*output*) pengawasan Obat dan Makanan kondisi pandemi covid-19 sudah menjadi endemi sehingga pelaksanaan kegiatan secara luring. Kemudian peningkatan jenis belanja barang juga terjadi pada belanja pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan alat pengolah data seperti Laptop/PC serta biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu mobling (mobil laboratorium keliling) dimana tahun sebelumnya (2022) hanya membiaya bahan bakar untuk 1 unit, sedangkan untuk tahun 2023 kendaraan dinas operasional (mobling) ada 2 unit..

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	Rp 423.071.854,00	Rp 455.850.927,00	(7%)
Belanja Barang Non Operasional	Rp 183.762.496,00	Rp 146.599.849,00	25%
Belanja Jasa	Rp 300.977.531,00	Rp 384.559.584,00	(22%)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 785.342.129,00	Rp 578.525.520,00	36%
Belanja Pemeliharaan	Rp 19.450.000,00	Rp 9.403.800,00	107%
Belanja Barang Persediaan	Rp 62.787.970,00	Rp 55.545.989,00	13%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.775.391.980,00</b>	<b>1.630.485.669,00</b>	9%
Pengembalian Belanja	2.240.620,00		N/A
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.773.151.360,00</b>	<b>1.630.485.669,00</b>	9%

Terdapat pengembalian belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 2.240.620,00. Adapun rincian pengembalian belanja barang tersebut adalah sebagai berikut :

Belanja Modal  
Rp  
121.587.034,00

1. Pengembalian belanja barang dengan nomor NTPN : 493310JSRCFKGMHQ tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp25.000,00 untuk pengembalian belanja perjalanan dinas,
2. Pengembalian belanja barang dengan nomor NTPN : 4C1B76QRA6GAKLUJ tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp760.000,00 untuk pengembalian belanja perjalanan dinas,
3. Pengembalian belanja barang dengan nomor NTPN : 6F5DF45IQN2FJ012 tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp1.066.020,00 untuk pengembalian belanja perjalanan dinas,
4. Pengembalian belanja barang dengan nomor NTPN : 493CA2CNR1TMNK30 tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp389.600,00 untuk pengembalian belanja perjalanan dinas.

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp121.587.034,00 dan Rp654.503.247,00. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 81,42 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini dikarenakan pada TA 2022 terdapat anggaran untuk pengadaan mobil laboratorium keliling (Mobling).

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 121.587.034,00	Rp 654.503.247,00	(81%)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 121.587.034,00</b>	<b>Rp 654.503.247,00</b>	<b>(81%)</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	N/A
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 121.587.034,00</b>	<b>Rp 654.503.247,00</b>	<b>(81%)</b>

Realisasi belanja modal ini merupakan atas pembelian fasilitas perkantoran berupa:

**Tabel 10**  
**Pembelian Peralatan dan Mesin 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>KUANTITAS</b>	<b>NILAI</b>
1	Microphone/Boom Stand	1	1.100.000,00
2	Sepeda Motor	1	19.808.567,00
3	Lap Top	3	37.500.000,00
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.800.000,00
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	15.900.000,00
6	Filing Cabinet Besi	3	5.745.000,00
7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2.930.000,00
8	Handy Talky (HT)	3	9.973.101,00
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	8.057.366,00
10	A.C. Split	1	4.773.000,00
10	P.C Unit	1	10.000.000,00
	Total	21	121.587.034,00

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Aset Lancar

*Aset Lancar*  
*Rp70.445.541,00*

Jumlah Aset Lancar Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp70.445.541,00 dan Rp81.331.140,00.

#### C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja Dibayar*  
*Dimuka*  
*Rp11.771.090,00*

Nilai belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.771.090,00 dan Rp22.390.356,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11  
Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

Keterangan	2023	2022
Pembayaran Sewa Mobil Operasional	Rp 6.072.460,00	Rp 12.309.041,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp 5.698.630,00	Rp 5.698.630,00
Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor	Rp -	Rp 4.382.685,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.771.090,00</b>	<b>Rp22.390.356,00</b>

Tabel 12  
Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2023

Keterangan	2023	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Nilai Kontrak
Pembayaran Sewa Mobil Operasional	Rp 6.072.460,00	B-PL.02.01.10B.10B5.01.23.0084	2 Februari 2023 s.d 1 Februari 2024	Rp 69.264.000,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp 5.698.630,00	PR.02.01.10B.10B5.02.23.152	22 Februari 2023 s.d 21 Februari 2024	Rp 40.000.000,00
Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor	Rp -			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.771.090,00</b>			

### C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp58.674.451,00 dan Rp58.940.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13  
Perbandingan Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Persediaan	Tahun 2023	2022
Barang Konsumsi	Rp 58.282.215,00	Rp 58.709.784,00
Suku Cadang	Rp 392.236,00	Rp 231.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 58.674.451,00</b>	<b>Rp 58.940.784,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (null rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (null rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (null rupiah).

Pada Tahun 2023 Loka POM Lubuklinggau mendapatkan transfer masuk dari satker Sekretariat Utama berupa persediaan sarana penyimpanan arsip aktif dengan BAST no PL.03.01.25.251.05.23.490 Tanggal 05 Januari 2023 Senilai Rp2.424.300,00 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Telah dilakukan stok opname atas persediaan yang hasilnya tercantum dalam BA Stok Opname No. PR.06.03.10B.10B5.12.23.1495 tanggal 31 Desember 2023.

Tabel 14  
Tabel Stok Opname Persediaan Tahun 2023

SUB KELOMPOK BARANG		Kuantitas	Kuantitas
Kode	Nama Akun	(kartu persediaan)	(cek Fisik)
117111	Barang Konsumsi	Rp58.282.215	Rp58.282.215
117114	Suku Cadang	Rp392.236	Rp392.236
Jumlah		Rp58.674.451	Rp58.674.451

Aset Tetap

Rp 6.815.205.586,00

## C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.815.205.586,00 dan Rp798.257.763,00. Aset tetap pada Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Tanah Rp

6.065.021.000,00

### C.2.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.065.021.000,00 dan Rp36.000.000,00.

Tabel 15  
Rincian Mutasi Tanah

Saldo per 01 Januari 2023	Rp	36.000.000
Mutasi tambah :	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	6.029.021.000
Mutasi Kurang :	Rp	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>6.065.021.000</b>
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>6.065.021.000</b>

Tabel 16  
Rincian Tanah TA 2023

No	Uraian	Luas	Lokasi	Status Sertifikasi BMN	Jenis Sertifikat	Pemegang Hak	No. Sertifikat	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.115 m2	Jl. Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1	Bersertifikasi	Hak Pakai	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan	No. 00054	6.065.021.000
<b>Jumlah</b>								<b>6.065.021.000</b>

Pada tanggal 09 April 2023 telah diterbitkan sertifikat hak pakai dengan No. 00054 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan luas 3.115 m<sup>2</sup>. Namun terdapat

perbedaan pada kuantitas/luas tanah yang terdapat pada sertifikat hak pakai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan luas 3.600 m<sup>2</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan koordinasi dengan BPN Kota Lubuklinggau untuk dapat memberikan klarifikasi terkait perubahan kuantitas/luas tanah tersebut. Selain itu, tanah tersebut telah dilakukan penilaian wajar oleh KPKNL Lahat dengan No. S-806/KNL.0403/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sehingga dilakukan koreksi perubahan nilai bertambah menjadi senilai Rp6.065.021.000,00.

*Peralatan dan Mesin*  
*Rp 1.757.553.628,00*

### **C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.757.553.628,00 dan Rp1.518.268.014,00. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>		<b>Rp 1.518.268.014,00</b>
Mutasi tambah :		
Pembelian		Rp 121.587.034,00
Reklasifikasi Masuk		Rp 898.110.154,00
Transfer Masuk		Rp 115.970.330,00
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>Rp 1.135.667.518,00</b>
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar		Rp (896.381.904,00)
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>(896.381.904,00)</b>
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>		<b>Rp 1.757.553.628,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		(1.007.369.042,00)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2023</b>		<b>Rp 750.184.586,00</b>

Mutasi tambah terdiri dari:

- Pembelian berupa peralatan dan mesin senilai Rp121.587.034,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18  
Rincian Mutasi Tambah TA 2023

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Sepeda Motor	1	19.808.567
2	Filling Cabinet Besi	3	5.745.000
3	A.C. Split	1	4.773.000
4	Microphone/Boom Stand	1	1.100.000
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2.930.000
6	Handy Talky (HT)	3	9.973.101
7	P.C Unit	1	10.000.000
8	Lap Top	3	37.500.000
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	13.857.366
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	15.900.000
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>121.587.034</b>

- Reklasifikasi Masuk akibat kesalahan pengkodean senilai Rp898.110.154,00 yang terdiri dari :

Tabel 19  
Rincian Reklasifikasi Masuk TA 2023

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI	NO.SURAT	TANGGAL
1	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	2	893.906.604		
2	Papan Visual/Papan Nama	1	1.728.250		
3	Telephone Mobile	1	2.475.300		
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>898.110.154</b>		

- Transfer Masuk senilai Rp115.970.330,00 dari Deputi Bidang Penindakan dengan No. PL.03.03.61.615.11.23.0738 tanggal 13 November 2023 yang terdiri dari :

Tabel 20  
Rincian Transfer Masuk TA 2023

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Camera Video	1	8,400,000
2	Camera Digital	1	21,900,000
3	Telephone Mobile	1	15,719,820
4	Teropong/Keker	1	24,950,000
5	Drone	1	45,000,510
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>115,970,330</b>

Mutasi kurang terdiri dari:

Reklasifikasi keluar dengan PL.03.01.10B.10B5.09.23.1062 tanggal 27 September 2023 berupa peralatan dan mesin senilai Rp896.381.904,00 dikarenakan kesalahan pengkodean barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21  
Rincian Mutasi Kurang TA 2023

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	2	893.906.604,00
2	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	2.475.300,00
Total			896.381.904,00

### C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp 1.007.369.042,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp1.007.369.042,00 dan Rp756.010.251,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No.	Uraian	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.757.553.628	(1.007.369.042)	750.184.586
Total		1.757.553.628	(1.007.369.042)	750.184.586

*Kewajiban jangka  
pendek  
Rp6.438.447,00*

### C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.438.447,00 dan Rp5.620.721,00.

*Utang kepada Pihak  
ke tiga  
Rp6.438.447,00*

#### C.3.1 Utang Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak ke tiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.438.447,00 dan Rp5.620.721,00. Adapun Rincian utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 23  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

AKUN	URAIAN	NILAI	
212112	Beban Langganan Listrik	Rp	4.714.460,00
212112	Beban Langganan Telepon	Rp	1.681.100,00
212112	Beban Langganan Air	Rp	42.887,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>6.438.447,00</b>

*Ekuitas*

Rp 6.879.212.680,00

**C.4 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.879.212.680,00 dan Rp873.968.182,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan

Beban Pegawai  
Rp 0,00

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp 1.809.412.041,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.809.412.041,00 dan Rp1.762.593.272,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 24  
Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Tunjangan PPH PNS	Rp 24.800,00	Rp 260.500,00	(90%)
Beban Tunjangan Beras PNS	Rp 37.658.400,00	Rp 34.834.020,00	8%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	Rp 69.615.000,00	Rp 60.690.000,00	15%
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 2.545.000,00	Rp 4.750.000,00	(46%)
Beban Uang Makan PNS	Rp 93.241.000,00	Rp 99.994.000,00	(7%)
Beban Tunjangan Struktural PNS	Rp 5.400.000,00	Rp 7.560.000,00	(29%)
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 610.756.780,00	Rp 577.115.980,00	6%
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 38.444.138,00	Rp 39.487.658,00	(3%)
Beban Uang Lembur	Rp 334.000,00	Rp 1.247.000,00	(73%)
Beban Tunjangan Anak PNS	Rp 10.212.326,00	Rp 8.588.384,00	19%
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 12.916,00	Rp 12.004,00	8%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Rp 915.403.337,00	Rp 928.053.726,00	(1%)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-Rp 185.000,00	Rp -	N/A
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-Rp 4,00	Rp -	N/A
Beban Gaji Pokok PPPK	Rp 8.899.500,00	Rp -	N/A
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 138,00	Rp -	N/A
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 975.000,00	Rp -	N/A
Beban Tunjangan Beras PPPK	Rp 217.260,00	Rp -	N/A
Beban Uang Makan PPPK	Rp 2.072.000,00	Rp -	N/A
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	Rp 13.785.450,00	Rp -	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.809.412.041,00</b>	<b>Rp 1.762.593.272,00</b>	<b>3%</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan  
Rp 65.478.603,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.478.603,00 dan Rp56.996.499,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 65.478.603,00	Rp 56.996.499,00	15%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 65.478.603,00</b>	<b>Rp 56.996.499</b>	<b>15%</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp 919.248.873,00*

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp919.248.873,00 dan Rp987.540.581,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26  
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	486.300,00	933.300,00	(48%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.494.000,00	79.060.000,00	(3%)
Beban Jasa Lainnya	77.615.000,00	50.942.000,00	52%
Beban Jasa Profesi	18.400.000,00	14.800.000,00	24%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	74.142.115,00	40.264.800,00	84%
Beban Sewa	151.907.266,00	256.777.144,00	(41%)
Beban Bahan	97.899.431,00	91.105.049,00	7%
Beban Langganan Air	613.110,00	498.897,00	23%
Beban Langganan Listrik	43.705.947,00	38.666.295,00	13%
Beban Honor Output Kegiatan	4.900.000,00	2.700.000,00	81%
Beban Langganan Telepon	20.173.200,00	20.138.264,00	0%
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	6.820.950,00	12.530.000,00	(46%)
Beban Keperluan Perkantoran	346.091.554,00	345.319.973,00	0%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	30.537.654,00	N/A
Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	2.636.000,00	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>919.248.873,00</b>	<b>986.909.376,00</b>	<b>(7%)</b>

Penurunan beban barang dan jasa dikarenakan adanya peraturan terbaru untuk mobil operasional hanya satu mobil untuk tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2022 dua mobil.

Beban  
Pemeliharaan  
Rp 19.450.000,00

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.450.000,00 dan Rp58.752.014,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27  
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 46.515.000,00	N/A
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 19.450.000,00	Rp 9.403.800,00	107%
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp 2.833.214,00	N/A
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 19.450.000,00</b>	<b>Rp 58.752.014,00</b>	(67%)

Beban Perjalanan  
Dinas Rp  
783.101.509,00

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp783.101.509,00 dan Rp578.525.520,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28  
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 405,481,705.00	Rp 360,250,282.00	13%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 234,924,424.00	Rp 95,078,238.00	147%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 69,900,000.00	Rp 107,900,000.00	(35%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 75,036,000.00	Rp 15,297,000.00	391%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	( Rp 760.000)	Rp -	N/A
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	( Rp 1.480.260)	Rp -	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 785,342,129.00</b>	<b>Rp 578,525,520.00</b>	36%

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp  
245.130.490,00

### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp245.130.490,00 dan Rp206.950.879,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) ) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 245.130.490,00	Rp 206.950.879	18%
			-
<b>Amortisasi</b>	<b>Rp 245.130.490,00</b>	<b>Rp 206.950.879</b>	18%

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp600.000,00

## D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30  
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	600.000	-	N/A
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>600.000</b>	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>600.000</b>	-	-

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya senilai Rp600.000,00, berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa kelebihan pembayaran perjalanan dinas Tahun 2022 sesuai NTPN A5E003CIFATFE64S tanggal 17 Mei 2023.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp  
873.968.182,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp873.968.182,00 dan Rp393.653.554,00.

*Defisit LO Rp  
3.841.221.516,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.841.221.516,00 dan Rp3.650.727.560,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang  
Menambah/Mengurangi  
Ekuitas Rp  
6.029.021.000,00*

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp6.029.021.000,00 dan Rp0,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

#### E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp6.029.021.000,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari telah dilakukannya penilaian wajar tanah oleh KPKNL Lahat tanggal 24 Agustus 2023.

*Transaksi Antar  
Entitas Rp  
3.817.445.014,00*

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.817.445.014,00 dan Rp4.131.042.188,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 31  
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 3.704.150.435,00
Diterima dari Entitas Lain	Rp (600.000,00)
Transfer Masuk	Rp 113.894.579,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.817.445.014,00</b>

#### E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Loka POM di kota Lubuklinggau yang melibatkan kas Negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp600.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp3.704.150.435,00.

Tabel 32  
DDEL dan DKEL TA 2023

Transaksi Antar Entitas		Nilai
<b>Diterima dari entitas lain terdiri dari</b>		
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	600.000,00
<b>JUMLAH DDEL</b>	<b>Rp</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ditagihkan ke entitas lain terdiri dari :</b>		
Realisasi Belanja Pegawai	Rp	1.809.412.041,00
Realisasi Belanja Barang	Rp	1.773.151.360,00
Realisasi Belanja Modal	Rp	121.587.034,00
<b>JUMLAH DKEL</b>	<b>Rp</b>	<b>3.704.150.435,00</b>

#### E.4.2 Transfer Masuk

Transfer masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan BPOM, antara Kementerian/Lembaga dan antar Badan POM dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp113.894.579,00. terdiri dari:

Tabel 33  
Transfer Masuk TA 2023

No.	Entitas Awal	No. BAST	Tgl. BAST	Nama Barang	Nilai
1	Sekretariat Utama	PL.03.01.25.251.05.23.490	05/01/23	Barang Konsumsi	Rp2,424,300.00
2	Deputi Bidang Penindakan	PL.03.03.61.615.11.23.0738	13/11/2023	Aset Tetap	Rp 115,970,330.00
Jumlah					Rp 118,394,630.00

Pada tanggal 13 November 2023 pada saat transaksi transfer masuk juga terdapat penyusutan atas BAST nomor PL.03.03.61.615.11.23.0738 atas item drone senilai Rp 4.500.051,00.

*Ekuitas Akhir Rp*  
*6.879.212.680,00*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.879.212.680,00 dan Rp 873.968.182,00.

## **F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Gedung Kantor dan Mobil Operasional**

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima hibah tanah dan gedung dengan status sertifikat atas nama Badan POM. Namun kondisi gedung yang diterima dalam keadaan kondisi rusak berat sesuai BAST No. 030/02/BPKAD.V/2022 tanggal 04 Januari 2023. Maka dari itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Tahun 2023 masih menyewa gedung kantor periode sewa 22 Februari 2023 s.d. 21 Februari 2024 yang berlokasi di Jl. Garuda No.149 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.

Untuk kendaraan dinas jabatan kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menggunakan sewa pihak ketiga dengan nomor plat mobil BL 1402 AZ dan periode sewa 02 Februari 2023 s.d 01 Februari 2024.

### **F.2 Pengelola Keuangan**

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor HK.02.02.10B.05.23.489 dan HK.02.02.10B5.09.23.1055 tentang Penunjukan pengelola anggaran Pada Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023, per tanggal 01 Oktober 2023 dan 01 Juni 2023 terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan satker Loka POM di Kota Lubuklinggau, yaitu sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ronny Syafri, M.Si.,Apt

Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Ikbal, S.E.

Pejabat Penandatanganan : Terry Rongga Nugraha, SH  
SPM

Bendahara Pengeluaran : Andi Naskan, A.Md.

PPABP : Muhammad Mursalin.,A.Md.,Kom  
Pejabat Pengadaan : Ayu Afiatul Kamala, SH

### F.3 Nomor rekening dan NPWP

Adapun nomor wajib pajak dan nomor rekening Loka POM di Kota Lubuklinggau :

Tabel 34  
Rincian Nomor Rekening dan Saldo 31 Desember 2023

Bank	Nomor	Nama	Saldo Per 31 Desember 2023
Bank Mandiri	8100126728511000	BPG070 BPOM LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	Rp0,00

### F.4 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Peraturan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 1053 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35  
Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Batang pengaduk kaca	Buah	36
2	Pipet vol 10 ML	Buah	3
3	Pipet Vol 25 ML	Buah	2
4	Rubber Bulb	Buah	2
5	Pipet Tetes Panjang	Buah	10
6	Pipet Tetes Pendek	Buah	11
7	Beaker Low Form 50 ML	Buah	7
8	Beaker Low Form 250 ML	Buah	7
9	Tabung Ulir	Buah	10
10	Botol Duran 100ML	Buah	4
11	Tabung Reaksi 15ML	Buah	690
12	Tabung Reaksi 5ML	Buah	82
13	Vial 20ML	Buah	51
14	Vial 5 ML	Buah	53
15	Vial 10 ML	Buah	52
16	Beaker Glass Plastik	Buah	2
17	Lumpang + Alu	Buah	2
18	Beaker Glass 100ML	Buah	29
Jumlah			1053

### F.5 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang obat dan makanan (Penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang- barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait pidana yang sedang ditangani sehingga dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di gudang barang bukti Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Tabel 36  
Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti

NO	proses	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1	Proses SPDP/SPDP				8 item				
2	Tahap 1								
3	P-18/P-19								
4	P-21								
5	SP3								
TOTAL (Pcs)		0	0	0	8	0	0	0	0

## F.6 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 2 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

### 1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas dengan pagu sebesar Rp 30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 29.875.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama satker	Program/kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%

Loka POM di Kota Lubuklinggau	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	30.000.000	29.875.480	99,58	UMKM	2	2	100
-------------------------------	------------------------------	------------	------------	-------	------	---	---	-----

## 2. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 5 (lima) program prioritas, 8 (delapan) kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp 728.577.000,00 dan realisasi sebesar Rp 724.397.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama satker	Program/kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%
Loka POM di Kota Lubuklinggau	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	93.451.000	93.279.340	99,82	Lembaga	1	1	100,00
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di Loka Pom Kota Lubuklinggau	77.251.000	77.203.144	99,94	Perkara	1	2	200,00
	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	174.600.000	173.901.628	99,60	Orang	291	346	118,90
	UMKM yang didampingi dalam pemenuh	30.000.000	29.875.480	99,58	UMKM	2	2	100,00

	an standar oleh UPT							
	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.768.000	41.682.888	97,46	Produk	92	92	100,00
	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	58.801.000	58.454.663	99,41	Produk	203	204	100,49
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	46.317.000	44.975.280	97,10	Lembaga	42	50	119,05
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	205.389.000	205.025.178	99,82	Lembaga	212	250	117,92

## F.7 Pengungkapan Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 3 diantaranya terdapat di BPOM dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Anggaran Responsif Gender (ARG)(03)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	79.946.000	79.875.545	99,91	Layanan	31	37	119,35	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	174.600.000	173.901.628	99,60	Orang	291	346	118,90	PN III

### 2. Anggaran Kesehatan (06)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	55.316.000	55.285.296	99,94	Kegiatan	13	13	100	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	14.100.000	13.849.070	98,22	Keputusan	2	4	200,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	115.244.000	114.834.570	99,64	Laporan	1	1	100	-
Loka POM di	79.946.000	79.875.545	99,91	Layan	31	37	119,35	-

Kota Lubuklinggau				an				
Loka POM di Kota Lubuklinggau	52.799.000	52.387.034	99,22	Paket	1	1	100	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	69.200.000	69.200.000	100	Unit	8	8	100	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	125.960.000	125.522.704	99,65	Layanan	1	1	100	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	93.451.000	93.279.340	99,82	Lembaga	1	1	100	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	77.251.000	77.203.144	99,94	Perkara	1	2	200	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	174.600.000	173.901.628	99,60	Orang	291	346	118,90	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	42.768.000	41.682.888	97,46	Produk	92	92	100,00	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	58.801.000	58.454.663	99,41	Produk	203	204	100,49	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	46.317.000	44.975.280	97,10	Lembaga	42	50	119,05	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	205.389.000	205.025.178	99,82	Lembaga	212	250	117,92	PN III

nggau								
Loka POM di Kota Lubuklinggau	2.493.701.000	2.468.983.619	99,01	Layanan	1	1	100	-

### 3. Upaya Konvergensi Penanganan Stunting (08)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	79.946.000	79.875.545	99,91	Layanan	31	37	119,35	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	174.600.000	173.901.628	99,60	Orang	291	346	118,90	PN III

## F.8 Catatan Output Strategis Lainnya

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Tabel 37  
Capaian Output Periode 31 Desember 2023

No.	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	55.316.000	55.285.296	99,94	13	13	100,00
2	3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	14.100.000	13.849.070	98,22	2	4	200,00
3	3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	115.244.000	114.834.570	99,64	1	1	100,00
4	3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	79.946.000	79.875.545	99,91	31	37	119,35
5	3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	52.799.000	52.387.034	99,22	1	1	100,00
6	3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolahan data dan komunikasi	69.200.000	69.200.000	100,00	8	8	100,00
7	3165.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	125.960.000	125.522.704	99,65	1	1	100,00
8	3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	93.451.000	93.279.340	99,82	1	1	100,00
9	3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U27 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA LUBUKLINGGAU	77.251.000	77.203.144	99,94	1	2	200,00
10	3165.QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	174.600.000	173.901.628	99,60	291	346	118,90
11	3165.BDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30.000.000	29.875.480	99,58	2	2	100,00
12	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.768.000	41.682.888	97,46	92	92	100,00
13	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	58.801.000	58.454.663	99,41	203	204	100,49
14	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	46.317.000	44.975.280	97,10	42	50	119,05
15	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	205.389.000	205.025.178	99,82	212	250	117,92
16	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	2.493.701.000	2.468.983.619	99,01	1	1	100,00